

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Peneliti akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan juga rekomendasi dengan berdasarkan hasil temuan penelitian. Pada bagian akhir skripsi ini, dapat diuraikan bahwa Evaluasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam Memberdayakan Gelandangan dan Pengemis di Kota Bekasi, secara lebih rinci peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator evaluasi formatif menurut Michael Scriven (1967):
 - a. Indikator pertama yaitu target, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sudah memperoleh program ATENSI di tahun 2021 secara umum sudah sesuai dengan target yang direncanakan di awal bahkan cenderung melebihi dari apa yang sudah di target kan di awal namun sasaran target ini bukan hanya untuk gelandangan dan pengemis saja melainkan bagi seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), jika ada target yang belum tercapai maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi
 - b. Indikator kedua yaitu kuantitas dan Kualitas:

Dari segi kualitas perencanaan programnya Balai Pangudi Luhur Bekasi sudah berubah menjadi multifungsi layanan yang bukan hanya

menangani satu jenis permasalahan melainkan seluruh permasalahan sosial yang membuat pelayanan yang diberikan semakin fleksibel, lentur dan tidak kaku, dari segi anggaran maupun pelaksanaan programnya. Program ATENSI ini juga sudah diterapkan di balai seluruh Indonesia. Balai Pangudi Luhur Bekasi juga bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, kemudian bekerja sama juga dengan beberapa LKS, beberapa bank, beberapa perusahaan dan bekerja sama juga dengan beberapa layanan kesehatan.

Dalam program ATENSI para PPKS bisa mendapatkan fasilitas layanan secara langsung dan tidak langsung dengan metode *multi tasking* dimana setiap 1 orang PPKS bisa mengikuti jenis pelatihan lebih dari satu kewirausahaan. Dengan adanya program ATENSI ini dinilai cukup efektif untuk membuka banyak peluang bagi penyelesaian seluruh permasalahan sosial bukan hanya menangani permasalahan gelandangan dan pengemis saja melainkan seluruh permasalahan sosial.

Kemudian dari segi kuantitas pelaksanaan program ATENSI, Balai Pangudi Luhur Bekasi merekrut tenaga-tenaga terampil diantaranya yang menangani Sentra Kreasi ATENSI (SKA) berjumlah 12 orang, asesmen terpadu berjumlah 14 orang, pelayanan konseling berjumlah 11 orang, pelayanan residensial berjumlah 38 orang, pekerja sosial berjumlah 57, ATENSI alat bantu berjumlah 6 orang, ATENSI barang jasa berjumlah 5

orang, dengan keseluruhan pegawai yang ditotal berjumlah 185 pegawai yang berada di Balai Pangudi Luhur Bekasi.

- c. Indikator ketiga yaitu sumber-sumber, dari segi anggaran, dalam program ATENSI anggaran yang tertulis di RKL masing-masing berkisar antara 2-3 juta namun dalam pelaksanaannya anggaran tersebut tidak dibatasi karena berdasarkan hasil asesmen masing-masing pekerja sosial dan perintah menteri kalau kasus tersebut harus ditangani secara tuntas maka berapapun biayanya akan dikeluarkan. Kemudian dari segi tenaga, dalam pelaksanaan program ATENSI pelayanannya dilakukan 1x24 jam baik itu untuk pelayanan residensial, pelayanan ke mitra, maupun pelayanan kepada masyarakat sehingga membuat para pegawai harus stand by setiap saat dibutuhkan harus selalu ada. Kemudian dari segi peralatan, bantuan yang diberikan melalui program ATENSI mulai dari keperluan papan, sandang, pangan, maupun keperluan usahanya dan kebutuhan akan kesehatannya semua sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan hidup layak PPKS.
- d. Indikator keempat yaitu koreksi, terdapat beberapa hambatan diantaranya kesulitan beradaptasi terhadap pemberlakuan aturan dan sistem yang baru, semakin banyaknya PPKS yang mendapatkan pelayanan namun anggarannya tidak mencukupi karena di tingkat daerah pun tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan gelandangan dan pengemis yang ada hanya penampungan sementara di Rumah Singgah, dan kesulitan dalam mencari identitas para PPKS. Selain adanya hambatan dalam

pelaksanaan program ATENSI ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaannya diantaranya kesulitan dalam mempelajari sistem yang baru karena sebelumnya terbiasa hanya menangani satu permasalahan saja peksos dituntut dalam kemampuannya, selain itu juga kesulitan untuk mencari jati diri PPKS yang sebenarnya dan kesulitan untuk merubah mental dan perilaku mereka, selain itu juga kesulitan dalam meningkatkan etos kerja pegawai. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial secara berjenjang melalui direktorat jenderal rehabilitasi sosial, inspektorat, BPKB, dan BPK setiap semester (triwulan) dengan memonitoring dan evaluasi, jika target tidak tercapai maka akan dicarikan solusinya. Kalau untuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Balai Pangudi Luhur Bekasi terhadap para PPKS yang berada di dalam balai dilakukan pendampingan dan pengawasan oleh para peksos sedangkan untuk PPKS yang sudah diterminasi diawasi melalui RT/RW setempat

- e. Indikator yang kelima yaitu umpan balik, dalam pelaksanaan program ATENSI tentunya memunculkan harapan maupun masukan dari beberapa pihak, harapan tersebut diantaranya agar program ATENSI ini dapat tetap berjalan dan mencakup seluruh permasalahan sosial agar bisa dijangkau, ditangani dan diselesaikan melalui program ATENSI, selain itu juga anggarannya lebih ditingkatkan agar dapat mengakomodir seluruh kebutuhan PPKS secara layak dan mandiri secara ekonomi, kemudian agar yang mengikuti program ATENSI ini benar-benar orang yang memiliki

kemauan yang tinggi untuk merubah nasib, selain itu juga agar lebih baik lagi dari tahun ke tahun dan juga lebih siap lagi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, harapannya agar lebih tepat sasaran lagi sehingga outputnya akan terlihat, harapannya agar lebih disosialisasikan lagi program-programnya kepada para mitra terutama terkait program ATENSI. Dengan adanya program ATENSI ini tidak menutup kemungkinan adanya masukan-masukan dari beberapa pihak yang terlibat diantaranya ditingkatkan lagi tunjangan kinerjanya karena kurang sesuai dengan pelayanan 1x24 jam yang diberikan, kalau terhadap program ATENSI ini agar setiap masyarakat yang memiliki informasi terkait data PPKS agar menyerahkan datanya kepada pihak balai agar balai dapat mengakseskan program ATENSI kepada para PPKS tersebut, kalau untuk saran yang diberikan kepada pihak kementerian sosial agar memberikan informasi terkait PPKS kepada pihak balai maka nanti langsung akan ditindaklanjuti oleh pihak balai, lebih bersinergi lagi terhadap pemerintah daerah setempat dengan tupoksi yang jelas kalau bisa dilibatkan dalam proses pendataan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan, lebih baik dananya disalurkan ke OPD, agar pelayanan yang diberikan lebih baik lagi, bantuan yang diberikan pun tepat sasaran dan lebih memperhatikan lagi kaum-kaum yang memang lemah dalam ekonominya.

2. Indikator koordinasi menurut Hasibuan (2011):
 - a. Indikator yang pertama yaitu kesatuan tindakan, kementerian sosial sebagai pembuat kebijakan/program dengan UPT/Balai sebagai pelaksana dari program tersebut. Sedangkan Dinas Sosial sebagai mitra mengalokasikan PPKS kepada pihak balai sebagai pelaksana dari program ATENSI tersebut untuk diberikan pemberdayaan, kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh pihak Balai dengan pihak Dinas Sosial saling berkoordinasi bertukar informasi, melakukan pengawasan terhadap program-program yang dijalankan, mengalokasikan, saling berkolaborasi untuk mengentaskan permasalahan sosial. Kalau koordinasi yang dilakukan melalui pihak LKS dan mitra lainnya dengan pihak Balai maupun Kementerian terkait program ATENSI ini hanya sebatas ketika ada momen-momen tertentu saja, mereka hanya sebatas pelapor kasus-kasus viral yang ada di sosial media yang perlu penanganan, penerima bantuan, penyalur PPKS untuk diberikan pemberdayaan melalui program ATENSI
 - b. Indikator yang kedua yaitu komunikasi, Balai Pangudi Luhur menginformasikan terkait program ATENSI hanya melalui mitra yang bekerja sama dengan balai maupun kementerian, tidak mensosialisasikannya secara langsung kepada para PPKS yang ada hanya penjangkauan langsung untuk menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Namun dari pihak Dinas Sosial masih ada yang belum mengetahui terkait program ATENSI. Dengan demikian terjadi silang pendapat antara pihak

balai dengan pihak dinas sosial terkait pensosialisasian program ATENSI yang disebabkan karena kurang masifnya koordinasi yang terjalin antara pihak balai dengan pihak mitra terkait sehingga masih ada pihak yang merasa belum mendapatkan sosialisasi dari balai. Adapun bentuk respon dari gelandangan dan pengemis terkait sosialisasi program ATENSI didapatkan tidak mendapatkan sosialisasi dari pihak yang terlibat terkait adanya program ATENSI yang dibuat oleh kementerian sosial RI

- c. Indikator yang ketiga yaitu pembagian kerja, sudah dilakukan pembagian kerja terkait program ATENSI oleh kementerian sosial dengan pihak pelaksana seperti UPT/Balai, maupun kepada pihak mitra seperti Dinas Sosial, LKS dan lain sebagainya. Setiap instansi tersebut memiliki kewajiban dan perannya masing-masing dalam pelaksanaan program ATENSI diantaranya pihak balai/UPT bertugas menjalankan program ATENSI dengan melakukan pemberdayaan, pendampingan, pemberian bantuan maupun pemberian pelatihan-pelatihan kepada para PPKS sedangkan bagi pihak Dinas Sosial bertugas untuk bertukar informasi kepada pihak balai terkait PPKS, mengakomodir para PPKS, dan saling berkolaborasi dengan para PPKS sedangkan bagi pihak LKS/Yayasan ketika balai membutuhkan PPKS nanti yayasan akan mengirim sesuai permintaan yang di perlukan, bila terkait ATENSI biasanya melalui balai baru ke yayasan dan dikembangkan di balai

d. Indikator keempat yaitu disiplin, pada pelaksanaan program ATENSI pelayanan yang diberikan oleh Balai Pangudi Luhur Bekasi sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Permensos Nomor 7 Tahun 2021 seperti penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak pelayanan rehabilitasi sosial karena setiap pekerja sosial memiliki prinsip etika yang sudah terlebih dahulu dijalankan sebelum adanya program ATENSI, selain itu juga karena sudah banyak yang diberikan bantuan oleh Kemensos mulai dari keperluan papan, sandang, pangan, maupun keperluan usahanya dan kebutuhan akan kesehatannya semua sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan hidup layak PPKS. Meskipun ada pegawai yang masih belum mengetahuinya. Pada pelaksanaan program ATENSI pelayanan yang diberikan oleh Balai Pangudi Luhur Bekasi juga sudah sesuai dengan penerapan prinsip landasan atau pedoman seperti prinsip holistik, prinsip berbasis hak, prinsip multiprofesi, prinsip multilevel intervensi, prinsip multiaktor kolaborasi, prinsip dinamis, prinsip integratif, prinsip komplementaritas, prinsip berjejaring. Meskipun ada pegawai yang masih belum mengetahuinya.

3. Indikator persepsi menurut Bimo Walgito (2010):

a. Indikator pertama yaitu penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu, dengan adanya program ATENSI membuat adanya beberapa tanggapan/kesan yang baik bagi para PPKS seperti dengan adanya program ATENSI dapat merubah hidup mereka baik itu dari segi ekonomi ataupun

dari segi keterampilan namun ada beberapa PPKS juga yang masih belum merasakan perubahan dalam hidupnya karena belum pernah mendapatkan ATENSI seperti beberapa PPKS liar yang penulis temukan di jalanan.

- b. Indikator kedua yaitu pengertian atau pemahaman, ada beberapa PPKS yang merasa belum mendapatkan sosialisasi dari pihak balai terkait ATENSI hanya pernah mendengar dari PPKS lain yang pernah diterminasi, namun ada juga PPKS yang sudah mengetahui program ATENSI karena sudah pernah disosialisasikan sebelumnya, lain halnya dengan gelandangan dan pengemis yang berada di luar balai tidak mengetahui sama sekali terkait program ATENSI karena dari pihak manapun belum pernah ada yang melakukan sosialisasi kepada gelandangan dan pengemis. Dengan demikian sosialisasi yang dilakukan oleh pihak balai terkait ATENSI belum dilakukan secara merata dan masif kepada seluruh PPKS baik itu yang berada di luar balai maupun yang berada di dalam balai sehingga pemahaman para PPKS terhadap program ATENSI juga berkurang. Bagi beberapa PPKS ada yang sudah mampu untuk memproduksi paper bag maupun kerajinan tangan yang lain dengan berbahan dasar sampah hasil mengikuti pelatihan vokasional daur ulang sampah selain itu juga sudah mampu untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain, kemudian ada juga PPKS yang sudah mampu untuk menerapkan ilmu yang didapatkan melalui pelatihan vokasional olahan pangan yang difasilitasi oleh Balai Pangudi Luhur Bekasi dengan berjualan di SKA dan menerima pendapatan yang

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun bagi gelandangan dan pengemis yang berada di luar balai belum mendapatkan pelatihan yang di fasilitasi oleh Balai Pangudi Luhur Bekasi karena belum mendapatkan dan belum mengetahui program ATENSI.

- c. Indikator ketiga yaitu penilaian atau evaluasi, beberapa PPKS menilai bahwa program ATENSI ini sudah banyak membantu mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan maupun dari segi keilmuan dan keterampilan bagi para PPKS.

5.2. Rekomendasi

Penulis menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan peneliti kepada peneliti selanjutnya serta rekomendasi kepada Balai Pangudi Luhur Bekasi sebagai berikut:

5.2.1. Rekomendasi Akademik

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya diantaranya yaitu:

1. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk menambah keilmuan khususnya Ilmu Administrasi Negara terkait evaluasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam memberdayakan gelandangan

dan pengemis yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami proses evaluasi.

2. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama, serta peneliti lain dapat mengadakan penelitian lanjutan dengan menggunakan metodologi dan teori-teori metodologi yang berbeda sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
3. Bagi Mahasiswa Universitas Islam “45” Bekasi agar dapat menjadi sebuah pembelajaran ilmu mengenai evaluasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) khususnya dalam memberdayakan gelandangan dan pengemis.
4. Bagi Universitas Islam “45” Bekasi semoga dengan hasil penelitian ini menghasilkan sebuah khazanah Ilmu Administrasi Negara yang dapat bermanfaat untuk orang banyak terutama bagi mahasiswa dan para dosen agar dapat melakukan penelitian yang lebih baik untuk kedepannya khususnya evaluasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam memberdayakan gelandangan dan pengemis.

5.2.2. Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan rekomendasi atau saran bagi lembaga atau instansi dengan harapan bisa bermanfaat bagi lembaga tersebut yakni sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan sosialisasi secara merata kepada seluruh pihak baik itu kepada SDM aparaturnya, maupun kepada para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial karena agar program-program terobosan yang dibuat lebih tepat sasaran.
2. Perlunya dilakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin oleh pihak direktorat jenderal rehabilitasi sosial terhadap pelaksanaan program ATENSI.
3. Perlu dilakukan penataan *database* dengan berbasis aplikasi khusus untuk menginput data para penerima manfaat.
4. Perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan dalam program ATENSI agar program yang dijalankan bukan hanya sekedar program formalitas untuk melaksanakan program kerja saja namun dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi penerima manfaat.